



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
(PENGAWASAN TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA TIK)
KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN GRESIK JAWA TIMUR
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 16 S.D 18 NOVEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan
2. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
9. Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.
10. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 31 Oktober 2023.

B. Tujuan

Mengacu pada persoalan di atas, maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan ini terkait bantuan perangkat TIK ke Kabupaten Gresik Jawa Timur, untuk melihat secara langsung implementasi bantuan perangkat TIK ke satuan pendidikan oleh Kemendikbudristek.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda kerja kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Gresik Jawa Timur di antaranya yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Gresik Hj. Aminatun Habibah, M.Pd. yang dihadiri:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Hariyanto, S.Pd., M.M.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gresik, Suyono, S.H., S.Sos., M.M.
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Jawa Timur.
 - d. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur Sujarno M.Pd.
 - e. Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Gresik.
 - f. Tokoh Pendidikan Kabupaten Gresik.
 - g. Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP Negeri dan Swasta) Penerima Bantuan Perangkat TIK dan Perwakilan Pendidik (Guru) Kabupaten Gresik.
2. Tinjauan lapangan ke UPT SMPN 34 Gresik dan UPT SDN 009 Gresik.

B. Susunan Keanggotaan Tim

Kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Kunjungan Kerja ini didampingi oleh pejabat mitra Komisi X DPR RI dari Kemendikbudristek RI yaitu Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak. sebagai Pj. Direktur SMA Kemendikbudristek RI. Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan DPR RI.

C. Identifikasi Data dan Informasi

Berikut catatan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Gresik terkait bantuan perangkat TIK ke satuan pendidikan di Kabupaten Gresik:

1. Pemerintah menilai bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan memiliki peran yang penting, yaitu sebagai keterampilan (*skill*) dan kompetensi, infrastruktur pendidikan, sumber bahan ajar, alat bantu fasilitas pendidikan, manajemen pendidikan, dan sistem pendukung keputusan. Sehingga Kemendikbudristek RI menggagas Program Digitalisasi Pendidikan sejak tahun 2019. Program ini membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti akses internet dan perangkat teknologi. Hal tersebut mendorong pemerintah membuat kegiatan dukungan digitalisasi pendidikan menjadi salah satu program/kegiatan strategis APBN 2021.
2. Penyaluran bantuan peralatan TIK bertujuan guna menunjang proses pembelajaran peserta didik. Selain itu, bantuan ini juga dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Sasaran penerima program, diprioritaskan kepada sekolah yang belum siap dalam pelaksanaan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) dengan kategori Sekolah Potensial 1 dan atau Sekolah Potensial 2. Penerima bantuan juga diutamakan yang bukan penerima DAK Peralatan Komputer

tahun 2021. Kriteria Sekolah Potensial 1 yaitu memiliki komputer/laptop kurang dari 15 unit, memiliki sumber listrik yang cukup, dan juga memiliki koneksi internet. Untuk kriteria Sekolah Potensial 2 sama dengan Sekolah Potensial 1, hanya saja tidak harus memiliki koneksi internet.

3. Data kriteria sekolah potensial didapat dari Dapodik yang diolah oleh tim dari Setditjen Paud Dikdasmen dengan memperhitungkan sasaran yang akan mendapatkan bantuan sejenis dari program DAK. Setelah didapatkan daftar sekolah calon sasaran penerima bantuan, proses selanjutnya adalah verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota calon penerima bantuan. Tujuan dari verval ini untuk mengonfirmasi ke Dinas Pendidikan apakah sekolah yang masuk calon penerima bantuan memang memenuhi syarat dan tidak sedang menerima bantuan lainnya.
4. DAK Fisik di Kabupaten Gresik antara lain dilakukan penyaluran bantuan TIK sesuai kebutuhan, sebanyak 765 unit *chromebook* di 51 lembaga SD/SMP Negeri/Swasta. Peralatan TIK: *chromebook*, *wireless*, proyektor, *conector*, sangat bermanfaat bagi pembelajaran.
5. Dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam bantuan TIK adalah:
 - a. Sarana dan prasarana: ruangan (Lab. Komputer) yang layak, jaringan *wifi*, dan jaringan listrik.
 - b. Menganggarkan bantuan alat TIK bagi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan bantuan dari pusat (DAK Pusat).
 - c. Peningkatan SDM melalui pelantikan untuk guru dan operator.
 - d. Memaksimalkan peran CSR dalam membantu infrastruktur pendidikan.
6. Manfaat yang nampak dari penyaluran bantuan TIK adalah:
 - a. *Platform* Merdeka Mengajar dapat diimplementasikan di satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah (sekolah negeri) dan masyarakat (sekolah swasta).
 - b. Belajar mandiri oleh guru untuk meningkatkan implementasinya; PDB melalui kegiatan “benahi yang ada” di PMM (*Platform* Merdeka Mengajar); Peserta didik belajar literasi dan numerasi melalui asesmen murid yang disediakan PMM; dan Guru dan Kepala Sekolah dapat menuangkan praktik baiknya dengan mengirim aksi nyata di PMM.
 - c. Memaksimalkan guru dalam mengakses PMM yang biasa dilakukan melalui gawai masing-masing saat di luar sekolah dan mengakses melalui komputer (perangkat TIK) saat di sekolah; dan peserta didik menggunakan komputer di Lab. Komputer untuk belajar melalui PMM.
 - d. Peserta Asesmen Nasional (AN atau AKM) sejumlah 45 siswa disediakan 3 komputer server dengan masing-masing server untuk 15 komputer Clien; survei lingkungan belajar bagi guru dan kepala sekolah memanfaatkan komputer dan jaringan internet yang ada di sekolah; dan kebutuhan lain untuk kegiatan AKM dan Surlingjar (Survei Lingkungan Belajar) guru dan kepala sekolah adalah listrik dan internet yang disediakan oleh sekolah.

7. Harapan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengadaan TIK di sekolah adalah:
 - a. Diharapkan Pemerintah Pusat memberikan bantuan peralatan TIK lebih banyak lagi ke semua lembaga sehingga merata.
 - b. Perencanaan, pendataan, sosialisasi dan pengawalan bantuan bisa lebih ditingkatkan terutama di daerah yang masih sangat membutuhkan.

D. Permasalahan dan Temuan

1. Beberapa sekolah yang telah menerima *chromebook*, di antaranya masih terkendala oleh fasilitas pendukung lainnya, seperti listrik dan fasilitas internet (*wifi*) yang stabil dan kuat. Selain itu juga pelaku pembelajaran belum terampil dalam menggunakan fasilitas TIK. Kemudian diperlukan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan agar pengadaan fasilitas tersebut lebih optimal, serta tetap diperlukan penambahan peralatan TIK baru.
2. Pada kunjungan ke SMPN 34 dan SDN 009 Gresik, Prof Zainudin Maliki menyampaikan catatan bahwa masing-masing sekolah sudah mendapatkan *chromebook*, meskipun masih dirasa kurang. Meski demikian, maka perlu merubah strategi pembelajaran. Strateginya adalah optimalisasi peralatan tersebut, misalnya dengan pelatihan bagi guru agar kreatif dalam melakukan “desain pembelajaran”. Bisa juga dengan strategi pembelajaran kolaboratif, misalnya penggunaan *chromebook* digunakan bersama 4-7 siswa. *Platform* pembelajaran, tidak perlu harus sama dengan yang disajikan, bisa melakukan modifikasi dalam menyiapkan bahan-bahan ajar.
3. Kabupaten Gresik tengah berupaya menangani anak berkebutuhan khusus, terutama melalui sekolah inklusi. Kendala yang dihadapi antara lain adalah kesulitan memenuhi kebutuhan jumlah pendidik/guru bagi anak berkebutuhan khusus, karena spesifikasi kebutuhan anak tersebut sangat beragam. Jika pemerintah mendorong sekolah berbasis inklusi, maka diusulkan agar terdapat kurikulum yang khusus menilai anak berkebutuhan khusus, yang tidak sama penilaiannya dengan anak normal meskipun bersekolah di sekolah yang sama.

E. Pembahasan

Pada kunjungan spesifik di Kabupaten Gresik, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI:

1. Wakil Bupati Gresik Hj. Aminatun Habibah, M.Pd. menyampaikan beberapa catatan, di antaranya:
 - a. IPM Gresik adalah 7,9. Angka ini diatas rata-rata nasional. Namun angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Gresik masih lebih besar

dari angka nasional meskipun makin menurun dari semula 8% kini angka pengangguran tinggal 6,6%. Angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh Covid-19.

- b. Anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik, sekitar sepertiganya dialokasikan untuk pendidikan, salah satunya untuk *mensupport* guru. Misalnya untuk mendukung guru menjadi ASN maupun sertifikasi guru. Meski demikian, gaji guru terutama PAUD, masih sangat kecil (250 Ribu sampai 500 Ribu Rupiah).
 - c. Anggaran pendidikan juga untuk *mensupport* kepada SMA/SMK bahkan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiah dan Aliah, meskipun pendidikan tersebut di luar tanggungjawab Pemkab Gresik. Misalnya untuk beasiswa agar anak SMA/Aliah dapat melanjutkan ke Strata-1. Beasiswa dari CSR juga didorong untuk membantu siswa agar bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
 - d. Kabupaten Gresik memiliki "Rumah Vokasi" yang dikelola, baik anggaran maupun pengurusnya langsung dari dunia industri. Hal ini diinisiasi oleh Pemkab Gresik untuk menekan angka pengangguran dari SMK.
2. Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik menyampaikan catatan sebagai berikut:
- a. Tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang, lulusan SMK menyumbang sekitar 9,6% pengangguran tersebut padahal anggaran sudah disumbangkan kepada sekolah-sekolah SMK. Pengangguran lulusan SMK tersebut muncul karena pemerintah tidak mengimbangnya dengan menciptakan lapangan pekerjaan.
 - b. Sarana-prasarana pendidikan, misalnya sekolah Inpres yang dibangun tahun 1980-an, kini banyak yang rusak bersamaan. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah.
 - c. Masalah sumberdaya manusia juga menjadi kendala besar. Ketika guru swasta diangkat menjadi ASN, maka terjadi perpindahan besar-besaran guru ke sekolah negeri, sehingga sekolah swasta menjadi kekurangan guru. Diusulkan agar guru swasta yang menjadi ASN tetap mengajar di swasta tempat sebelumnya mengajar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Hariyanto, S.Pd., M.M. menyampaikan beberapa catatan:
- a. Bantuan TIK dari Pusat sangat bermanfaat bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Gresik. Dampak bantuan TIK antara lain pembelajaran merdeka mengajar. Diharapkan bantuan tersebut dapat berlanjut, termasuk untuk sarana pendukung lainnya.
 - b. Di Kabupaten Gresik, sekitar 70% sekolah (SD) rusak, baik ringan maupun berat. Terdapat anggaran merenovasi, saat ini terdapat 7 sekolah yang renovasinya dikerjakan oleh PUPR.
4. Ustadzah Aini SD Al-Madany Gresik, menyampaikan beberapa catatan, antara lain bahwa SD Al-Madany baru memasuki tahun kedua, dan sangat terbantu oleh bantuan peralatan TIK. Sekolah SD Al-Madany adalah

sekolah berbasis *experience* (pengalaman) yang pembelajarannya dikembangkan dengan metode keteladanan, mengembangkan sifat kepemimpinan, dan jiwa kewirausahaan dengan metode magang dan belajar pada ahlinya.

5. Kepala SMP Modern Al-Miftah Fatoni Mohamad, menyampaikan telah menerima 15 unit *chromebook* namun terkendala fasilitas lainnya seperti wifi. Winarti UPT SDN 31 Gresik, setelah menerima 15 *chromebook*, kendala berikutnya adalah keterampilan guru, sehingga memerlukan pelatihan bagi guru untuk mengoptimalkan fasilitas TIK tersebut.
6. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur Sujarno M.Pd. menyampaikan beberapa di antaranya bahwa pemanfaatan *chromebook* sangat penting untuk AKM dan Indonesia mengajar.
7. Pj. Direktur SMA Kemendikbudristek RI Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak., antara lain menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendidikan yang terbatas tidak sebanding dengan kebutuhan yang banyak. Anggaran fungsi pendidikan yang sekitar Rp575,3 Triliun harus dibagi ke seluruh Indonesia dan 20-an K/L. Jika untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang rusak dengan anggaran 14 Triliun per tahun, butuh 31 tahun untuk mampu melakukan seluruh perbaikan. Butuh waktu yang lama.
 - b. Maka kebijakan yang diambil oleh Kemendikbudristek adalah fokus bukan pada sarpras tetapi transformasi pembelajaran. Memperbaiki (transformasi) pembelajaran di antaranya dengan bantuan TIK, sehingga bentuk pembelajarannya dapat relevan dengan kebutuhan dan kemajuan jaman. Bantuan TIK dapat dilakukan pada pengajuan DAK fisik melalui KRISNA.
 - c. Kemdikbud mendorong untuk mengembangkan sekolah inklusi, bukan menambah SLB. Kini telah ada direktorat khusus yang menangani sekolah inklusi. Untuk mendukung hal tersebut telah terbit Permendikbud No. 49 Tahun 2023 tentang Kewajiban Sekolah Inklusi. Dengan adanya Permendikbud tersebut maka ke depannya terdapat layanan disabilitas, yang dapat diakses oleh Sekolah Inklusi.
8. Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa untuk pembelajaran di daerah dengan kendala geografis (kepulauan) sulit diatasi tanpa memprioritaskan Sarpras. Bahkan ketika mengajukan Sarpras melalui Dapodik, tidak selalu direspon segera. Hal ini menjadi kendala hampir di seluruh Indonesia. Lebih tepat jika skala prioritas menjadi kebijakan pemerintah dalam memajukan pendidikan, terutama di daerah dengan kendala geografis.
9. Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainudin Maliki menyampaikan catatan antara lain sebagai berikut:
 - a. Terkait lulusan yang tidak mendapatkan pekerjaan, harus diawali dengan mengubah *mindset* pembelajaran kita: bukan mencari pekerjaan tetapi menciptakan pekerjaan.

- b. Terkait guru PPPK yang berasal dari swasta, pemerintah terkendala UU ASN yang mengharuskan bahwa ASN bekerja pada lembaga negara. Oleh karena itu perlu terobosan regulasi agar guru swasta yang di ASN-kan, tetap bekerja di lembaga swasta sebelumnya (sekolah asal).
10. Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari menyampaikan catatan antara lain bahwa anggaran 20% APBN untuk fungsi pendidikan, ternyata yang digunakan benar-benar untuk pendidikan adalah 14% dari 20% tersebut. Atau hanya sekitar 80-90 Triliun Rupiah. Anggaran yang kecil juga berpengaruh pada fasilitas pendidikan dan anggaran riset.

III. KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Secara umum, pelaksanaan bantuan TIK di sekolah-sekolah tertentu di Kabupaten Gresik berjalan baik. Pada pelaksanaan DAK Fisik di Kabupaten Gresik, antara lain telah dilakukan penyaluran bantuan TIK sesuai kebutuhan, sebanyak 765 unit *chromebook* di 51 lembaga SD/SMP Negeri/Swasta. Peralatan TIK: *chromebook*, *wireless*, proyektor, *conector*, sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Namun terdapat beberapa sekolah yang masih terkendala oleh fasilitas pendukung lainnya, seperti listrik dan fasilitas internet (*wifi*) yang stabil dan kuat, kemudian juga pelaku pembelajaran belum terampil dalam menggunakan fasilitas TIK.
2. Untuk mengoptimalkan peralatan TIK yang masih kurang, Pemkab Gresik dan para guru, didorong untuk mengubah strategi pembelajaran, misalnya dengan pelatihan bagi guru agar kreatif dalam melakukan “desain pembelajaran”. Atau strategi pembelajaran kolaboratif, misalnya penggunaan *chromebook* digunakan bersama 4-7 siswa. Platform pembelajaran, tidak perlu harus sama dengan yang disajikan, bisa melakukan modifikasi dalam menyiapkan bahan-bahan ajar. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan agar pengadaan fasilitas tersebut lebih optimal.
3. Pemerintah Kabupaten Gresik saat ini tengah berupaya menangani anak berkebutuhan khusus, terutama melalui pengembangan sekolah inklusi. Kendala yang dihadapi antara lain adalah kesulitan memenuhi kebutuhan jumlah pendidik/guru bagi anak berkebutuhan khusus karena spesifikasi kebutuhan anak tersebut sangat beragam. Jika pemerintah mendorong sekolah berbasis inklusi, Pemkab Gresik mengusulkan agar terdapat penilaian khusus bagi anak berkebutuhan khusus, yang tidak sama penilaiannya dengan anak normal meskipun bersekolah di sekolah yang sama.

B. Rekomendasi

1. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk meningkatkan anggaran bagi penambahan bantuan TIK ke tiap satuan pendidikan, dan mendorong pengguna TIK untuk dapat memanfaatkan sarana TIK yang ada dengan

- optimal, misalnya dengan pelatihan bagi guru dalam mendesain pembelajaran atau strategi pembelajaran kolaboratif.
2. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengembangkan Sekolah Inklusi, di antaranya pemenuhan kebutuhan jumlah pendidik/guru dan mendukung adanya penilaian khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagai bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rapat dengan mitra kerja Komisi X DPR RI.

Jakarta, 20 November 2023
Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A-338